

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal
(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2016-2018)

Ulkia Mafazah

Program Studi D3 Akuntansi
STIE PUTRA BANGSA KEBUMEN
ulkiamafazah99@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada pemerintahan provinsi se-Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi pada tahun 2016-2018 sehingga total populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 102. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2016-2018. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan uji t, uji F, koefisien determinasi, dan koefisien korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal.

Abstract

The purpose of this research was to determine whether there is influence of Original Local Government Revenue and Balance Fund of the Allocation of Capital Expenditure to the provincial government as Indonesia. The population of this research is a Provincial Government of Indonesia consist of 34 Province in 2016-2018 so the total population used is 102. This research uses secondary data in the form of budget realization report a Provincial Government of Indonesia in 2016-2018. Testing the hypothesis in this research using multiple linear regression t test, F test, the coefficient of determination, and the coefficient of correlation. The result showed that the Original Local Government Revenue and Balance Fund significant effect on Capital Expenditure.

Keywords: *Original Local Government Revenue, Balance Fund, Capital Expenditure.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. UU No. 33 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan yang besar untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Meski demikian dengan kewenangan yang besar tersebut tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki menurut kemauan sendiri, tanpa tujuan yang jelas. Kewenangan tersebut berupa amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan baik kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan dana perimbangan kepada seluruh daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004).

APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya.

Pada tahun 2016 tingkat kemandirian provinsi di Indonesia sebesar 48,33 persen dimana masuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa secara umum pemerintah provinsi sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Pada tahun 2017 dan 2018, kontribusi PAD mengalami penurunan menjadi 46,16 persen pada tahun 2017, dan menjadi 47,30 persen pada tahun 2018.

Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004). APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran (Halim, 2013: 21).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Dana Perimbangan bersumber dari:

1. Dana Alokasi Umum
2. Dana Alokasi Khusus
3. Dana Bagi Hasil

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal terdiri dari:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
5. Belanja modal lainnya
6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

METODE

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah belanja modal Provinsi se-Indonesia.

Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah PAD, Dana Perimbangan, dan realisasi Belanja Modal provinsi se-Indonesia tahun 2016-2018.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD provinsi se-Indonesia tahun 2016-2018. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, seperti Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2016-2018 yang terdiri dari data realisasi PAD, Dana Perimbangan, dan data realisasi belanja modal yang diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPk).

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi tahun 2016-2018.

Variabel Penelitian

- 1) Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018: 96). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal.
- 2) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya

atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Metode Analisis Data

1) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018: 239).

2) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan uji statistik *non parametric* Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2018:160) metode yang lebih handal adalah *Normal probability plot* yang membandingkan dari distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan *plotting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis akan menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b) Uji Multikolinieritas

Gani dan Amalia (2018, 139) menyatakan bahwa masalah asumsi klasik regresi bukan hanya terletak kepada adanya hubungan antardata dalam satu variabel, tetapi juga hubungan antara sesama variabel independen. Jika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan linear yang erat, maka model regresi ini tergejala oleh kondisi multikolinieritas.

Model regresi yang baik harus bebas dari gejala multikolinieritas. Jika tergejala multikolinieritas, maka model regresi menjadi buruk karena beberapa variabel akan menghasilkan parameter yang mirip sehingga dapat saling mengganggu. Agar model regresi bebas dari gejala hubungan yang kuat antarsesama variabel independen, maka perlu dilakukan pengujian multikolinieritas.

Pendeteksian *problem* multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10, maka

tidak ada gejala multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,10, maka ada gejala multikolinieritas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Ghozali(2018, 137) menyatakan bahwa heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Salah satu cara untuk mendiagnosis adanya heteroskedastisitas dalam satu model regresi adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Adapun atas dasar analisis dengan melihat grafik plot adalah sebagai berikut:

- Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada yang membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi Heteroskedastisitas
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Gani dan Amalia (2018, 137) menyatakan bahwa uji autokorelasi berkaitan dengan pengaruh *observer* atau data dalam satu variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Besaran nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya (atau data sebelumnya). Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh tergejala autokorelasi. Jika tergejala autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan di luar akal sehat.

Terdapat beberapa uji autokorelasi dan uji yang paling sering digunakan adalah uji *Durbin Watson* (DW *test*). Uji DW paling sering digunakan karena menjadi menu *default* pada program SPSS. Jika nilai hitung DW tidak berada pada rentang nilai tabel DW batas bawah dan batas atas, maka tidak terdapat masalah autokorelasi.

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

- $0 < d < dl$, berarti tidak ada autokorelasi positif dan keputusannya ditolak.
- $dl \leq d \leq du$, berarti tidak ada autokorelasi positif dan keputusannya *no decision*.
- $4 - dl < d < 4$, berarti tidak ada korelasi negatif dan keputusannya ditolak.
- $4 - du \leq d \leq 4 - dl$, berarti tidak ada korelasi negatif dan keputusannya *no decision*.
- $du < d < 4 - du$, berarti tidak ada autokorelasi, positif atau negatif dan keputusannya tidak ditolak.

Keterangan:

dl = batas bawah *Durbin Watson*

du = batas atas *Durbin Watson*

Uji *Durbin Watson* mempunyai kelemahan yaitu apabila nilai *Durbin Watson* terletak di antara dL dan dU atau $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ seperti hasil pengujian di atas, maka tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Apabila demikian hasilnya, terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah autokorelasi ini yaitu dengan menggunakan metode lain seperti Uji *Run Test*. Berikut ini adalah dasar pengambilan keputusan dalam Uji *Run Test*:

- Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat autokorelasi.

3) Uji Hipotesis

a) Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda dapat menjelaskan hubungan fungsional antara beberapa variabel, yang terdiri dari satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Model persamaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

b) Uji Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi (R) bilangan yang menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antara seluruh variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) (Gani dan Amalia, 2018: 157). Apabila hasil koefisien korelasi mendekati 1 maka semakin kuat hubungan seluruh variabel independen dengan variabel dependen.

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) untuk regresi berganda adalah sebuah bilangan yang menyebutkan proporsi (persentase) variasi

perubahan nilai-nilai variabel dependen (Y) yang ditentukan oleh variasi perubahan nilai-nilai seluruh variabel independen (X_i) (Gani dan Amalia, 2018: 158). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

d) Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk pengujian hipotesis semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat) dan juga untuk menentukan kelayakan model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi (Sig.) F yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 (5%). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen (bebas) secara bersama-sama mampu memengaruhi variabel dependen (terikat).

e) Uji Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Gani dan Amalia (2018, 160) menyatakan bahwa pengujian hipotesis pada model regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh nyata (signifikan) variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan Uji Statistik t adalah dengan melihat nilai signifikansi (Sig.):

- Jika nilai Signifikansi (Sig.) $<$ probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) atau hipotesis diterima.
- Jika nilai Signifikansi (Sig.) $>$ probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) atau hipotesis ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1) Statistik Deskriptif

Tabel 1. Tabel Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Mini mum	Maxi mum	Mean		Std. Devi ation
	Stat isti c	Stati stic	Stati stic	Stat isti c	Std . Err or	Stati stic
BELANJA MODAL	102	26.1 6	30.2 8	27. 616 4	.07 38 9	.746 25
PAD	102	26.3 5	31.4 1	28. 266 5	.11 82 7	1.19 448
DAPER	102	27.7 5	30.5 7	28. 782 1	.06 39 0	.645 37
Valid N (listwise)	102					

Sumber: data yang diolah, 2020

a) Belanja Modal

Belanja modal memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama tiga tahun sebesar 27,6164 dengan nilai minimum sebesar 26,16 yang dimiliki Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 30,28 yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018. Belanja modal mempunyai nilai standar deviasi sebesar 0,74625 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) 27,6164, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

b) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai rata-rata (*mean*) selama tiga tahun sebesar 28,2665 dengan nilai minimum sebesar 26,35 yang dimiliki Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 31,41 yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai standar deviasi 1,19448 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,2665 yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

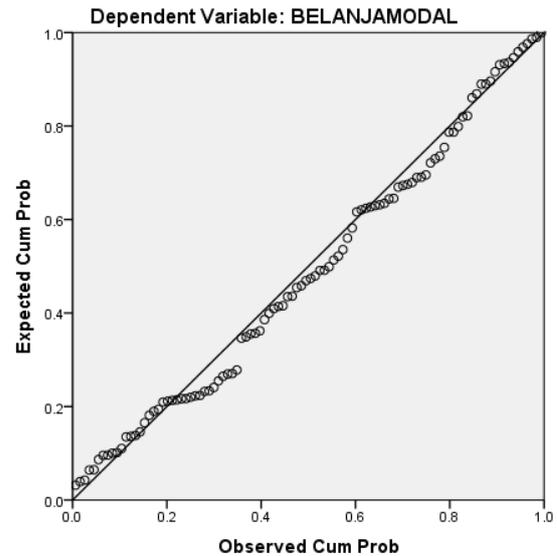
c) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan (Daper) mempunyai nilai rata-rata (*mean*) selama tiga tahun sebesar 28,7821 dan nilai minimum sebesar 27,75 yang dimiliki Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 30,57 yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Dana Perimbangan memiliki nilai standar deviasi 0,64537 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,7821 yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

2) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: data yang diolah, 2020

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Bersumber pada gambar (P-P Plot of Regression Standardized Residual) di atas dapat diketahui bahwa data mengikuti arah garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal yang menunjukkan data terdistribusi secara normal, sehingga dapat memberikan kesimpulan bahwa model regresi ini dapat digunakan dalam penelitian karena sudah memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Tabel Hasil Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.236	4.243
DAPER	.236	4.243

a. Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber: data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat apabila variabel independen (bebas) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Daper) masing-masing mempunyai nilai *tolerance* 0,236 dan 0,236 yang memperlihatkan bahwa nilai *tolerance* tersebut lebih dari 0,10 dan nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel adalah 4,243 dan 4,243 yang dapat dilihat bahwa nilai VIF kurang dari 10.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terdapat adanya gejala multikolonieritas antarvariabel independen (bebas) dalam model regresi.

c) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Tabel Hasil Heteroskedastisitas

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.830 ^a	.689	.683	.42031	1.701

a. Predictors: (Constant), DAPER, PAD

b. Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber: data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,701. Nilai *Durbin Watson* ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (n) = 102 dan jumlah variabel independen (bebas) adalah (k) = 2. Nilai batas bawah (dL) = 1,6376 lebih kecil daripada nilai *Durbin Watson* yaitu sebesar 1,701 dan lebih kecil dibandingkan dengan batas atas (dU) = 1,7175, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian *Durbin Watson* ini tidak dapat disimpulkan atau pengujian tidak meyakinkan, sesuai dengan kategori yang terdapat dalam tabel pengambilan keputusan *Durbin Watson*. Sehingga pada model regresi ini tidak terdapat autokorelasi positif.

Uji *Durbin Watson* mempunyai kelemahan yaitu apabila nilai *Durbin Watson* terletak di antara dL dan dU atau (4-dU) dan (4-dL) seperti hasil pengujian di atas, maka tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Apabila demikian hasilnya, terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah autokorelasi ini yaitu dengan menggunakan metode lain seperti Uji *Run Test*. Berikut ini adalah dasar pengambilan keputusan dalam Uji *Run Test*:

- Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat autokorelasi.

Hasil pengujian penelitian ini menggunakan Uji *Run Test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian *Run Test*

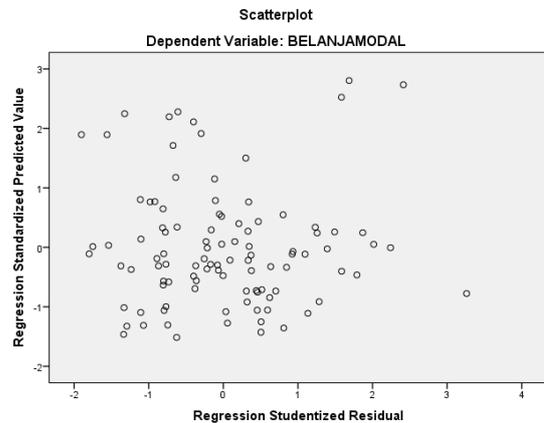
Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.02994
Cases < Test Value	51
Cases >= Test Value	51
Total Cases	102
Number of Runs	43
Z	-1.791
Asymp. Sig. (2-tailed)	.073

a. Median

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,073 yang lebih besar dari 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian autokorelasi menggunakan metode *Run Test* tidak terdapat gejala autokorelasi.

d) Uji Autokorelasi



Sumber: Data yang diolah, 2020

Gambar 2. Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar dengan baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan, sehingga model regresi ini layak dipakai.

3) Uji Hipotesis

a) Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Tabel Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.060	2.286		1.339	.184
	PAD	.152	.072	.244	2.112	.037
	DAPER	.704	.133	.608	5.271	.000

a. Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber: data yang diolah, 2020

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal
(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2016-2018)

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda di atas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,060 + 0,152PAD + 0,704DAPER + e$$

Dari persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai konstantan (α) sebesar 3,060 yang menjelaskan bahwa pada saat variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan bernilai 0 (nol) maka Belanja Modal bernilai 3,060.
- Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah 0,152 menyatakan bahwa setiap tambahan 1,00 Pendapatan Asli Daerah (X_1) akan meningkatkan Belanja Modal (Y) sebesar 0,152 dengan asumsi variabel independen (bebas) lainnya adalah tetap.
- Nilai koefisien Dana Perimbangan 0,704 yang menjelaskan bahwa setiap tambahan 1,00 Dana Perimbangan (X_2) maka akan meningkatkan Belanja Modal (Y) sebesar 0,704 dengan asumsi variabel independen (bebas) lainnya adalah tetap.

b) Uji Koefisien Korelasi (R)

Tabel 6. Tabel Uji Koefisien Korelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.830 ^a	.689	.683	.42031	1.701

a. Predictors: (Constant), DAPER, PAD

b. Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber: data yang diolah, 2020

Hasil dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi yang dihasilkan semakin kuat karena mendekati 1.

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Tabel Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.830 ^a	.689	.683	.42031	1.701

a. Predictors: (Constant), DAPER, PAD

b. Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber: data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa *R Square* adalah 0,689, hal ini dapat diartikan 68,9% Belanja Modal dipengaruhi

oleh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Sedangkan 31,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

d) Uji Statistik F

Tabel 8. Tabel Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38.756	2	19.378	109.689	.000 ^b
	Residual	17.490	99	.177		
	Total	56.246	101			

a. Dependent Variable: BELANJAMODAL

b. Predictors: (Constant), DAPER, PAD

Sumber: data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai tingkat signifikansi 0,000 yang berarti $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di seluruh Provinsi di Indonesia.

e) Uji Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 9. Tabel Uji Statistik t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.060	2.286		1.339	.184
PAD	.152	.072	.244	2.112	.037
DAPER	.704	.133	.608	5.271	.000

a. Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber: data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa dari dua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model signifikansi semua variabel independennya memengaruhi Belanja Modal, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian di atas bahwa uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) adalah sebagai berikut:

- H_1 = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Hasil Uji t pada tabel di atas, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel independen (bebas) Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,037 yang lebih kecil

dibandingkan dengan nilai signifikan 0,05. Maka dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa H_1 diterima, dengan arti adanya pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Sehingga semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula Belanja Modal.

- H_2 = Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Hasil uji yang dihasilkan dalam Tabel di atas menunjukkan apabila probabilitas signifikansi untuk variabel independen (bebas) Dana Perimbangan (X_2) sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada nilai signifikan 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa H_2 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Sehingga semakin besar Dana Perimbangan maka semakin besar pula Belanja Modal.

Pembahasan

- 1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama dalam penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil uji analisis t pada variabel Pendapatan Asli Daerah yang sudah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel independen (bebas) Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,037 yang mana lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi se-Indonesia. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin berpengaruh pula terhadap Belanja Modal, karena adanya bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang menggambarkan indikator dari Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah. Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pajak Daerah merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang paling banyak dan mengalami

peningkatan selama tiga tahun. Dana yang dimiliki daerah tersebut akan meningkat apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin tinggi pula nilai Belanja Modal suatu Daerah. Karena adanya Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka Pemerintah Daerah akan mempunyai dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan sarana serta prasarana agar dapat mengembangkan potensi Daerah tersebut.

Hasil dari penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

- 2) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua yang ada dalam penelitian ini adalah pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Hasil dari uji analisis t yang telah dilakukan sebelumnya terhadap variabel Dana Perimbangan menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel independen (bebas) Dana Perimbangan (X_2) sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua juga diterima, yang artinya Dana Perimbangan (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi se-Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar kontribusi Dana Perimbangan akan semakin berpengaruh pula terhadap Belanja Modal karena adanya bagian dari Dana Perimbangan yang menggambarkan indikator dari Belanja Modal.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Komponen Dana Perimbangan yang menyumbangkan dana paling banyak adalah Dana Alokasi Khusus dan terus meningkat selama tiga tahun. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Selain Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang termasuk dalam pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan. Dana yang dimiliki suatu Daerah akan meningkat apabila Dana Perimbangan juga meningkat. Dana Perimbangan mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai Dana Perimbangan maka akan semakin tinggi juga nilai Belanja Modal. Apabila Dana Perimbangan tinggi atau meningkat akan mampu menopang Belanja Modal yang belum bisa dilakukan oleh daerah

karena keterbatasan anggaran. Dana Perimbangan akan direalisasikan untuk belanja kepentingan umum dan kepentingan khusus sesuai dengan prioritas nasional dan pengembangan potensi wilayah daerah agar tercipta kesejahteraan.

Penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra dan Dewi (2018) yaitu Dana Perimbangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi se-Indonesia dengan nilai signifikansi yang terdapat dalam tabel Uji t yaitu sebesar 0,037 yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05.
2. Variabel Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi se-Indonesia dengan nilai signifikansi yang terdapat dalam tabel Uji t yaitu sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari nilai signifikan 0,05.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - 1) Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggunakan dan memanfaatkan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan benar dan sebijak mungkin untuk menambah pembangunan infrastruktur daerah atau sarana dan prasarana serta dapat meningkatkan Belanja Modal.
 - 2) Pemerintah Daerah juga diharapkan untuk bisa memanfaatkan Dana Perimbangan dengan benar agar dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan fiskal.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian yang akan datang dengan memperluas ruang lingkup penelitian dan menambahkan variabel independen (bebas) lain yang diduga bisa menjadi pengaruh Belanja Modal baik variabel keuangan maupun variabel non-keuangan yang belum diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Indonesia 2019. www.bps.go.id. diakses pada 29 Maret 2020 jam 19.03 WIB.

Fauzi, A. 2020. Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional. <https://cerdika.com/peran-indonesia-dalam-hubungan-internasional/>. diakses pada 4 Juni 2020 jam 20.04 WIB.

Gani, I. & Amalia, S. 2018. *Buku Alat Analisis Data (Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial)*. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Cetakan 9. Universitas Diponegoro. Semarang.

Gunawan, E. 2014. Analisis Faktor-Faktor Penentu Perubahan Nilai Tukar Rupiah Selama Krisis Global (Periode 2006-2013). *Repository.uin-suska.ac.id*. diakses pada 10 Juni 2020 jam 17.11 WIB.

Halim, A. & Kusufi, M. S. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

Haq, A. A. 2015. Belanja Pegawai. <https://www.wikiapbn.org/belanja-pegawai/#belanja-pegawai-n-1>. diakses pada 10 November 2019 pukul 10.30 WIB.

Hartiningih, H. & Halim, E. H. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Riau. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis* 7(2): 258-269.

Kementerian Keuangan RI. 2018. Laporan Realisasi Anggaran Provinsi se-Indonesia. <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>. diakses pada 5 November 2019 pukul 14.15 WIB.

_____. Pengertian Belanja Modal. www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-modal. diakses pada 10 November 2019 pukul 13.00 WIB.

Muchson. 2017. *Statistik Deskriptif*. Guepedia. Diakses 29 Maret 2020, dari Google Book.

Mulyatiningsih, E. 2011. *Riset Terapan: Bidang Pendidikan dan Teknik*. Cetakan Pertama. UNY Press. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 (Lampiran III) *Klasifikasi Anggaran*. 11 Juli 2011. Jakarta.

Putra, P. P. M. E. & Dewi, M. H. U. (2018). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud* 7(10): 2163-2189.

Raharjo, S. 2017. Cara Mengatasi Masalah Autokorelasi dengan Uji Run Test dalam SPSS. <https://www.spssindonesia.com/2017/03/autokorelasi-dengan-uji-run-test-spss.html?m=1>. Diakses pada 26 April 2020 jam 13.30 WIB.

- _____. 2014. Cara Melakukan Uji t Parsial dalam analisis regresi dengan SPSS. <https://www.spssindonesia.com/2014/02/cara-mudah-melakukan-uji-t-dengan-spss-html?m=1>. diakses pada 10 Mei 2020 jam 21.20 WIB.
- Rahayu, R. 2019. Analisis Faktor yang Memengaruhi Alokasi Belanja Modal di Sumatera Barat. *unand.ac.id*. diakses pada 15 Mei 2020 jam 14.23 WIB.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan 6. CV ALFABETA. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Universitas Brawijaya. 2015. Pengertian Pengujian Hipotesis. <https://www.coursehero.com/file/p31sn95/E-PENGUJIAN-HIPOTESIS-Uji-Hipotesis-adalah-metode-pengambilan-keputusan-yang/>. diakses pada 27 Desember 2019 pukul 21.41 WIB.
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2(1): 44-51.